

**DAMPAK KERJA SAMA UNITED NATIONS WORLD TOURISM
ORGANIZATION – INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN
KOMUNITAS WISATA INKLUSIF DI INDONESIA
(STUDI KASUS: PROGRAM *ALULA FRAMEWORK G20*)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen

Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

MEGA SORAYA

E061191078

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**DAMPAK KERJA SAMA UNITED NATIONS WORLD TOURISM
ORGANIZATION – INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN
KOMUNITAS WISATA INKLUSIF DI INDONESIA
(STUDI KASUS: PROGRAM ALULA FRAMEWORK G20)**

Disusun dan diajukan oleh :

MEGA SORAYA

E061191078

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu

Hubungan Internasional

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK KERJA SAMA UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION-INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KOMUNITAS WISATA INKLUSIF DI INDONESIA (STUDI KASUS : PROGRAM *ALULA FRAMEWORK G20*)

NAMA : MEGA SORAYA

NIM : E061191078

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

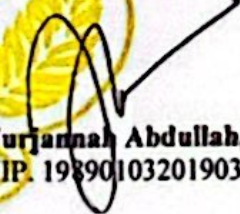
Makassar, 4 Oktober 2023

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.
NIP. 196307041988031001


Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,


Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK KERJA SAMA UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION-INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KOMUNITAS WISATA INKLUSIF DI INDONESIA (STUDI KASUS : PROGRAM ALULA FRAMEWORK G20)

NAMA : MEGA SORAYA

NIM : E061191078

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 8 September 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. M. Imran Hanafi, MA, M.E.c.

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Nurjannah Abdullah,, S.IP, MA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Soraya

NIM , : E061191078

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bawah skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

DAMPAK KERJA SAMA UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION - INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KOMUNITAS WISATA INKLUSIF DI INDONESIA (STUDI KASUS: PROGRAM *ALULA FRAMEWORK G20*)

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Agustus 2023




Mega Soraya

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, petunjuk, kekuatan, ilmu, pengetahuan, dan segala nikmat sehingga tugas akhir yang berjudul **”Dampak Kerja sama United Nations World Tourism Organization-Indonesia dalam Pengembangan Komunitas Wisata Inklusif di Indonesia (Studi Kasus : Program *AlUla Framework G20*)“** dapat diselesaikan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dan lulus dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan umpan balik berupa kritik dan saran yang konstruktif agar dapat menjadikan skripsi ini lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para pembaca. Selain itu, penelitian dan pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak, dengan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak **H. Ruslan Mahmud, SH** dan Mama **Hj, Sitti Munirah, SE., MM** tercinta. Terima kasih telah menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah melimpahkan kasih sayang, dukungan, do’a, dan perhatian yang tak terhingga dan telah menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terima kasih karena selalu memberikan kepercayaan

dan kesempatan kepada penulis untuk terus berproses dan menjadi individu yang kuat dan lebih baik. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis apapun keadaan yang terjadi. Semoga Allah SWT membalas dan memberkahi segala bentuk perhatian, dukungan, dan pengorbanan Bapak dan Mama dalam membesarkan dan mengantar putri bungsunya hingga sampai di titik ini. *I love you both eternally.*

2. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Prof. H. Darwis, MA., Ph.D** yang telah banyak berjasa menjadikan Departemen Ilmu Hubungan Internasional sebagai tempat yang berkualitas untuk menuntut ilmu. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen pembimbing penulis, yaitu Bapak **M. Imran Hanafi, MA., MEd** dan kak **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA** yang memiliki kontribusi yang sangat besar dan berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah membimbing, menuntun, dan mengayomi penulis dengan penuh semangat dan dukungan yang besar lewat arahan dan *insight* yang bermanfaat disetiap diskusi bimbingan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama 4 tahun ini. Menempuh pendidikan di Departemen ini adalah pengalaman yang tidak terlupakan dan sangat luar biasa.
3. Staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Ibu Rahma, Pak Ridho dan Kak Salmi** yang telah banyak membantu penulis selama melakukan studi dan pengurusan berkas serta administrasi. Begitu pula dengan Staff

Akademik FISIP dan segala jajarannya yang banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas. Semoga segala pekerjaan yang telah dilakukan bernilai pahala dan diberikan kemudahan.

4. Keluarga penulis, mulai dari kakak **Bulqis**, kakak **Dila**, kakak **Fauzan**, kakak **Wira** dan **Aleca**. Terima kasih telah memberikan perhatian, dukungan, dan ‘asupan’ serta senantiasa menghibur dan menjadi penyemangat penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar **Azikin Tanrere** dan keluarga besar **Paranrengi** atas segala doa, motivasi, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis.
5. Sahabat penulis, **Siti Annisaa Triana**. Terima kasih telah kebersamaan penulis dari kecil hingga saat ini penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah menjadi sandaran dan pendengar yang baik yang selalu menemani penulis dalam keadaan senang maupun susah. Terima kasih selalu memberikan semangat dan dukungan penuh hingga penulis dapat bangkit dari kata menyerah. *Cheers to many more years of friendship.*
6. Sahabat-sahabat Ayang, **Salsabil, Ima, Lulu, Yuyun, Almira, Titin**, dan **Afifa** serta Sahabat-sahabat Otues, **Aulia, Putri, Winda, Jelita, Andien**, dan **Andiza**. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada kapanpun dan dimanapun penulis membutuhkan bantuan dan selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah penulis juga tidak bosan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat ternyaman penulis untuk pulang. *Love you guys.*

7. Sahabat tersayang, **Aten, Alfira, dan Nabila**. Terima kasih telah memberikan tawa dan semangat yang sangat berarti untuk penulis serta menjadi tempat untuk saling bertukar pikiran dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan.
Love you guys.
8. Sahabat-sahabat PBL, **Tiara, Nadin, Sofy, Amanda, Sisi, Kintan, Chantika, Nada, Nisya, dan Syifa**. Terima kasih telah mengisi masa perkuliahan penulis dengan penuh warna. Terima kasih telah menjadi sumber keceriaan yang selalu memberikan dukungan dan semangat satu sama lain dalam menghadapi lika liku paper, essay, jurnal, dan tugas lainnya. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam mengerjakan skripsi. *Love you guys.*
9. Seluruh teman-teman Historia (HI Angkatan 2019), terkhusus **Iccang, Cawang, dan Akbar**, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik yang selalu menghibur untuk semua keluh kesah penulis sejak awal perkuliahan, **Muti, Ici, Canas, Nanda, Uci, Adit, Olaf, Iqbal, Farel, Uga, Wiwit, Riswan**, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah menjadi teman diskusi serta membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada **Kak Annisa Aprilia HI 18** sebagai teman seperjuangan selama seminar hasil, **Kak Sukma HI 18** dan **Raihan HI 20** yang sudah banyak membantu penulis dalam hal pengurusan berkas. *Wishing you all lots of luck!*

10. Teman-teman KKNT 108 Posko Tamasaju, **Rara, Nanda, Iis, Cornell, Fira, Hannah, Ikram, Fauzan,** dan **Rigal**. Terima kasih telah memberikan pengalaman dan warna baru dalam kehidupan penulis. Memberikan dukungan sejak masa KKN, Magang, sampai akhirnya masa penulisan skripsi. *See you guys on top.*
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Muda Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin (HIPMI PT UNHAS), terutama **Athalia, Kak Sasa, Kak Lily, Kak Tari, Kak Pide, Nabila, Salsabil, Saso** dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan pengalaman baru yang tak terlupakan serta tawa dan dukungan yang senantiasa hadir. Terima kasih telah menjadi wadah untuk meningkatkan minat, pengetahuan, dan karakter penulis dalam berorganisasi. Semoga semuanya sukses dan bahagia selalu.
12. Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Taylor Alison Swift** atas segala inspirasi melalui karya musiknya yang luar biasa yang telah menemani penulis selama proses penyusunan skripsi.
13. Last but definitely not the least, untuk **Mega Soraya** terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya karena sudah bertahan untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Terima kasih karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. *She believe she could, so she did. Long story short, she survived.*

ABSTRAK

Mega Soraya, 2019. E061191078. ‘DAMPAK KERJA SAMA UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION – INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KOMUNITAS WISATA INKLUSIF DI INDONESIA (STUDI KASUS: PROGRAM *ALULA FRAMEWORK G20*)’. Pembimbing 1 : M. Imran Hanafi, MA., M.Ec. Pembimbing II : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

United Nations World Tourism dan Indonesia bekerja sama untuk mengembangkan pariwisata inklusif dan berkelanjutan melalui *ALUla Framework For Inclusive Community Development Through Tourism*. Kerangka kerja tersebut merupakan panduan dan rekomendasi yang ditujukan untuk pemerintah, masyarakat lokal, dan *stakeholders* terkait dalam mengembangkan tujuan pariwisata inklusif dan berkelanjutan yang dikembangkan oleh *UNWTO* dan *Working Group G20*. Pengembangan pariwisata inklusif ini diimplementasikan melalui Desa Wisata sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Penelitian ini menggunakan teori kerja sama internasional, pariwisata berkelanjutan, dan pariwisata inklusif untuk mengukur sejauh mana pengembangan wisata inklusi di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan membaca, mencatat, menganalisis, mengolah dan mengumpulkan datanya dari berbagai sumber yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti rekomendasi *ALUla Framework*, desa wisata dinilai telah terbukti menjadi bentuk terbaik dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat yang inklusif. Keberadaan desa wisata tidak hanya menarik potensi wisata di sekitarnya, tetapi juga memberdayakan UMKM untuk berkontribusi dalam pengembangan destinasi wisata.

Kata Kunci : UNWTO, Inklusif, Pariwisata Berkelanjutan, Desa Wisata, *ALUla Framework*.

ABSTRACT

Mega Soraya, 2019. E061191078. ‘IMPACT OF THE UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION – INDONESIA COOPERATION ON THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE TOURISM COMMUNITIES IN INDONESIA (CASE STUDY: ALULA FRAMEWORK G20)’’. Advisor 1 : M. Imran Hanafi, MA., M.Ec. Pembimbing II : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddy University.

United Nations World Tourism and Indonesia are working together to develop inclusive and sustainable tourism through the AIUla Framework For Inclusive Community Development Through Tourism. The framework is a guide and recommendations aimed at governments, local communities and relevant stakeholders in developing inclusive and sustainable tourism goals developed by UNWTO and the G20 Working Group. This inclusive tourism development is implemented through Tourism Villages in accordance with the 2020-2024 National Medium Term Development Plan. This study uses the theory of international cooperation, sustainable tourism and inclusive tourism to measure the extent of the development of inclusive tourism in Indonesia. This research will use data collection techniques by way of literature study. This technique is done by reading, recording, analyzing, processing and collecting data from various relevant sources. The results of this study indicate that by following the recommendations of the AIUla Framework, tourism villages are considered to have proven to be the best form of developing inclusive community-based tourism. The existence of a tourist village not only attracts tourism potential in the surroundings, but also empowers MSMEs to contribute to the development of tourist destinations.

Keywords : UNWTO, Inclusive, Sustainable Tourism, Tourist Village, AIUla Framework

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual	9
A. Kerja Sama Internasional	10
B. Pariwisata Berkelanjutan	13
C. Pariwisata Inklusif	17
1.5 Metode Penelitian	22
A. Tipe Penelitian	22
B. Jenis Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	22
D. Teknik Analisis Data	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Kerja Sama Internasional	24
2.2 Pariwisata Berkelanjutan	28
2.3 Pariwisata Inklusif	36
2.4 Penelitian Terdahulu	43
BAB III GAMBARAN UMUM	47
3.1 Sejarah UNWTO (United Nations World Tourism Organization)	47
A. Kiprah UNWTO di Indonesia	50
3.2 Kerangka Kerja <i>AIUla Framework For Inclusive Community Development Through Tourism G20</i>	55
3.3 Pariwisata Inklusif di Indonesia	64
BAB IV PEMBAHASAN	73
4.1 Implementasi Kerja Sama UNWTO – Indonesia dalam Pengembangan Komunitas Wisata Inklusif melalui Program <i>AIUla Framework For Inclusive Community Development Through Tourism</i>	73
4.2 Dampak Kerja Sama UNWTO – Indonesia dalam Pengembangan Komunitas Wisata Inklusif melalui Program <i>AIUla Framework For Inclusive Community Development Through Tourism</i>	107
BAB V PENUTUP	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan pariwisata di era globalisasi memberikan dampak yang besar. Hal ini menyebabkan beberapa negara menjadikan sektor ini sebagai salah satu titik fokus untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Namun, dengan munculnya virus COVID pada tahun 2019, tentunya pariwisata mendapatkan ancaman sebab dampaknya terasa diseluruh rantai nilai pariwisata. Hal ini ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik pada awal tahun 2020, bahwa jumlah kunjungan wisata mancanegara tujuan ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,85% dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun 2019 pada bulan Februari.

Selama ini, pariwisata adalah sektor yang menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja. Angka ini belum termasuk dampak turunan atau *multiplier effect* yang mengikuti industri turunan yang terbentuk dibawahnya (Sugihamretha, 2020). Turunnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia berdampak kepada pemasukan devisa dari aspek pariwisata yaitu kurang lebih turun 1,3 Miliar USD. Sektor pendukung pariwisata yaitu hotel, restoran, hingga pengusaha retail juga ikut terdampak akibat COVID-19. Keuntungan hotel

mengalami penurunan yang signifikan yaitu sekitar 40% sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnis (Block, 2017).

Organisasi Pariwisata Dunia dibawah naungan PBB atau *United Nation World Tourism Organization (UNWTO)* mengatakan, tahun 2020 adalah tahun terburuk dalam periode sepanjang sejarah pariwisata dengan kedatangan internasional yang turun 74% dan kerugian yang diperkirakan sebesar 1,3 Triliun USD (UNWTO,2021). Dengan diberlakukannya berbagai macam kebijakan di setiap negara termasuk Indonesia seperti *lockdown*, PSBB, pembatasan dan pelarangan maskapai untuk terbang, *social distancing* dan sebagainya, mengharuskan masyarakat untuk bisa menerima dan membiasakan diri untuk tidak melakukan aktivitas tatap muka secara langsung demi memutus penyebaran mata rantai virus COVID-19.

Hal ini menjadi salah satu fokus utama pembahasan diberbagai pertemuan antar negara, salah satunya adalah forum kerjasama multilateral yaitu *Group of Twenty (G20)*. Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2020 diadakan di Riyadh, Arab Saudi. Munculnya tekanan terhadap COVID-19 membuat negara yang tergabung dalam G20 untuk memperkuat kerja sama luar negeri. Seluruh negara anggota didalam organisasi ini menyetujui untuk terus berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap dampak yang diakibatkan oleh virus COVID-19 dan dunia harus lebih mewaspadaai segala resiko yang akan muncul kedepannya serta memiliki misi yang sama yaitu menerapkan kebijakan yang efektif untuk segala aspek (Hua & Shaw, 2020).

Presidensi G20 ini mengusung tema “*Realizing the Opportunity of the 21st Century*”. Sejalan dengan tema tersebut, Arab Saudi berfokus pada tiga isu prioritas yaitu *empowering people* (memberdayakan masyarakat), *safe guarding the planet* (menjaga planet bumi), dan *shaping new frontiers* (membentuk batasan baru). Tema tersebut didasari oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengubah proses tatanan perekonomian menjadi ekonomi digital. Namun, partisipasi masyarakat dalam perekonomian khususnya para kelompok muda, perempuan dan UMKM masih dianggap belum optimal. Oleh karena itu, para negara anggota G20 sepakat untuk mengembangkan sebuah kebijakan yang akan digunakan untuk meningkatkan akses peluang dan pendekatan yang inklusif untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka mengatasi ketidaksetaraan dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat (Kemenlu, 2020).

Rencana aksi G20 adalah untuk menetapkan prinsip dan komitmen yang utama dalam memajukan kerja sama ekonomi internasional dalam mengatasi krisis yang melanda pada saat itu khususnya COVID-19 dan mengambil langkah untuk mendukung pemulihan dan mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif (G20, 2020). Dalam sektor pariwisata sendiri, para menteri pariwisata mengatakan mereka akan berfokus kepada dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pariwisata dan bagaimana mereka mempromosikannya kembali untuk kepentingan pengunjung dan komunitas lokal. Nilai dan potensi pertumbuhan pariwisata menjadikan posisi sektor ini sebagai pendorong utama inklusi, pertumbuhan ekonomi, dan pemulihan pasca

COVID-19 melalui kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja dalam komunitas perkotaan dan pedesaan di negara-negara G20 dan sekitarnya. (AIUla Framework, 2020).

Meskipun demikian, manfaat dan peran dari pariwisata seringkali tidak mengalir ke masyarakat ataupun tidak sepenuhnya dimaksimalkan untuk mempromosikan inklusi dan kesetaraan, mengurangi depopulasi dan meningkatkan kohesi regional serta peran pariwisata sebagai wadah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat yang inklusif seringkali tidak diperhatikan dalam perumusan dan implementasi kebijakannya. Untuk itu, diperlukan sebuah kerangka kerja berbasis bukti yang jelas untuk memandu dan mengukur kemajuan yang akan dicapai untuk mengatasi segala tantangan hingga peluang yang ada dalam sektor ini agar dapat terus berkontribusi dengan baik.

Maka dari itu, UNWTO bersama dengan *Working Group* G20 bekerja sama mengembangkan sebuah kerangka kerja untuk menjawab upaya-upaya sektor pariwisata dalam pemulihan pasca COVID-19 serta pengembangan masyarakat inklusif, yaitu *AIUla Framework For Inclusive Community Development Through Tourism*. Kerangka kerja ini bertujuan untuk membantu potensi sektor ini dalam berkontribusi untuk mencapai pengembangan masyarakat yang inklusif dan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (UNWTO, 2020). Kerangka ini memberikan panduan dan pedoman inspirasi kepada seluruh pemerintah serta pemangku kepentingan utama termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan industri

pariwisata lainnya untuk mendorong pendekatan yang benar-benar holistik dan terintegrasi.

AIUla Framework menempatkan pengembangan masyarakat inklusif di jantung kebijakan pariwisata melalui pendidikan, investasi, inovasi, teknologi serta pemberdayaan penduduk, perempuan, dan UMKM yang dapat mengubah mata pencaharian jutaan orang sekaligus melestarikan lingkungan dan budaya serta mendorong pemulihan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pilar tindakan dari *AIUla Framework* ini terdiri atas *empower* (memberdayakan), *safeguard* (perlindungan planet), *prosperity* (kemakmuran), dan *collaboration* (kemitraan). Pilar ini bersifat holistik dan fleksibel dimana mereka akan saling bergantung dan saling berkaitan satu sama lain untuk memaksimalkan dampak dan hasil dari masing-masing pilar. Pariwisata memiliki potensi yang sangat luas dan dapat berperan dalam mengatasi banyak tantangan yang dihadapi oleh suatu komunitas dalam negara, terutama ketika komunitas tersebut kecil dan lebih terpencil (Kenny, 2022).

Masyarakat inklusif dalam hal ini adalah masyarakat atau komunitas yang memperjuangkan anggotanya dari berbagai latar belakang dan menyediakan ruang yang aman bagi seluruh komunitasnya untuk berbagi pengalaman dan menerapkan inklusivitas tersebut dalam komunitasnya, dalam hal ini pariwisata inklusif adalah hak siapa saja yang dapat dirasakan oleh semua orang. Implementasi kerangka kerja *AIUla Framework* harus dapat diterapkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat terutama untuk daerah tertinggal yang ada di pedesaan atau perkotaan, UMKM, perempuan, etnis

minoritas, penyandang cacat disabilitas dan penduduk yang tingkat pendidikan formalnya lebih rendah (AIUla Framework, 2020).

Pariwisata membantu masyarakat untuk mempertahankan warisan alam dan budaya mereka yang unik, mendukung konservasi, menjaga spesies yang terancam punah dan memelihara tradisi dalam sosial budaya. Namun, dengan munculnya pandemi telah membuat dunia seakan berhenti. Krisis ini merupakan sebuah kesempatan untuk memikirkan kembali kontribusi sektor pariwisata terhadap manusia dan dampaknya terhadap planet tempat kita tinggal ini. Hal ini merupakan peluang untuk kembali membangun pariwisata yang lebih baik, inklusif dan tangguh (Pololikashvili, 2020).

Melalui *Working Group* G20, mereka menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi sebagai kontributor utama sektor pariwisata. Merupakan tanggung jawab seluruh *stakeholders* untuk memastikan bahwa pariwisata akan selalu menjadi sektor yang memberikan peluang untuk pemberdayaan, pendidikan, dan kewirausahaan untuk semua lapisan masyarakat. Maka dalam hal ini *AIUla Framework* sangat berperan menjadi panduan yang akan membantu para negara untuk memajukan peran pariwisata dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Al-Khateeb, 2020).

Kerangka kerja ini diimplementasikan diberbagai negara dan tentunya di Indonesia. Dengan adanya kerja sama tersebut menjadi hal yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk memulihkan pariwisata pasca COVID-19 dan pengembangan perekonomian negara. Gotong royong yang melekat pada

identitas diri warga Indonesia akan bergerak sejalan dengan diwujudkannya pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengikuti kiat-kiat yang ada di dalam *AIUla Framework*. Program ini difokuskan pada pengembangan komunitas wisata inklusif di Indonesia melalui pendekatan inklusif yang terintegrasi dengan strategi pembangunan nasional. Maka dengan hal tersebut, penelitian ini akan meneliti tentang **”Dampak Kerja sama United Nations World Tourism Organization-Indonesia dalam Pengembangan Komunitas Wisata Inklusif di Indonesia (Studi Kasus : Program *AIUla Framework G20*)”**

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus kepada kerjasama UNWTO dan Indonesia dalam mengembangkan komunitas wisata inklusif melalui program *AIUla Framework* yang dimulai pada tahun 2020. Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut, yakni:

1. Bagaimana implementasi kerja sama UNWTO dan Indonesia dalam pengembangan komunitas wisata inklusif melalui program *AIUla Framework*?
2. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari kerja sama yang telah dilakukan antara UNWTO dan Indonesia dalam pengembangan komunitas wisata inklusif melalui program *AIUla Framework*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

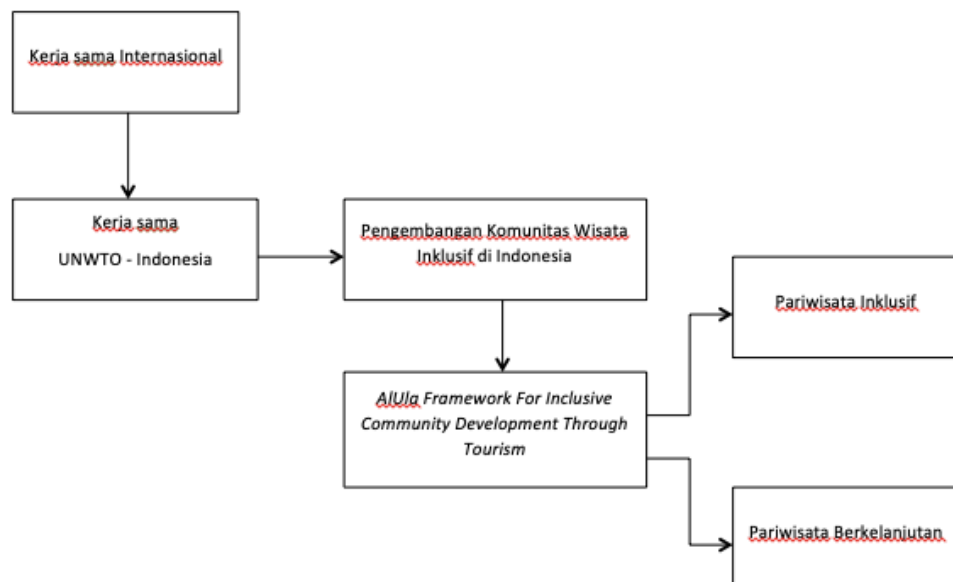
1. Mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi yang dilakukan dari kerja sama antara UNWTO dan Indonesia dalam mengembangkan komunitas wisata inklusif di Indonesia melalui program *AIUla Framework*.
2. Mengetahui dampak yang dihasilkan dari kerja sama UNWTO dan Indonesia dalam mengembangkan komunitas wisata inklusif di Indonesia melalui program *AIUla Framework*.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut, yakni;

1. Sebagai salah satu bentuk kontribusi berupa informasi terhadap Ilmu Hubungan Internasional. Khususnya pada studi kerja sama internasional dan pariwisata internasional.
2. Sebagai acuan berpikir dalam mengkaji dan menganalisis bagaimana dampak yang dihasilkan dari bekerja samanya UNWTO dan Indonesia dalam mengembangkan komunitas wisata Inklusif melalui program *AIUla Framework*.
3. Memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya kepada Mahasiswa dan Mahasiswi yang memiliki ketertarikan terhadap isu yang sama dengan perspektif berbeda dengan judul penelitian yang dimiliki oleh penulis.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam mendukung analisa yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan beberapa teori dari tokoh-tokoh dalam kajian Hubungan Internasional yang sesuai dengan tema, judul, dan masalah yang akan dibahas. Teori ini dijadikan sebagai bahan landasan pemikiran bagi penulis dan teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam kajian hubungan internasional itu sendiri. Untuk menganalisis dua rumusan masalah diatas, penulis akan menggunakan konsep Kerja sama Internasional, Pariwisata Berkelanjutan, serta Pariwisata Inklusif.



Bagan 1.1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan bagan diatas, dapat dilihat penelitian ini akan menggunakan teori kerja sama internasional dalam menganalisis kerja sama yang dilakukan antara UNWTO dan Indonesia. Kerja sama kedua aktor tersebut bertujuan untuk

mengembangkan komunitas wisata inklusif yang ada di Indonesia melalui program *AIUla Framework For Inclusive Community Development Through Tourism*. Lalu dari implementasi tersebut, penulis akan menggunakan teori Pariwisata Inklusif untuk melihat apakah mereka menjalankan implementasi *AIUla Framework* di Indonesia sesuai dengan prinsip pariwisata inklusif itu sendiri serta teori pariwisata berkelanjutan untuk melihat apakah hasil implementasi program tersebut dapat berdampak baik kepada Indonesia sehingga dikatakan sesuai dengan indikator keberhasilan yang sesuai dengan pariwisata berkelanjutan tersebut.

A. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional didefinisikan sebagai hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara merdeka dan berdaulat (atau lebih) dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Widiastuti & Wulandari, 2012). Kerja sama internasional memiliki banyak tujuan serta kepentingan, diantaranya adalah:

1. Mencukupi kebutuhan masing-masing Negara ;
2. Mencegah/menghindari konflik yang nantinya akan terjadi;
3. Memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka;
4. Mempererat hubungan antar negara di berbagai bidang;
5. Membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi;
6. Mengembangkan potensi dari masing-masing negara/aktor;
7. Membantu menuntaskan kemiskinan, dan;
8. Memajukan perdagangan guna meningkatkan kemakmuran negara yang terlibat.

Sedangkan menurut K.J Holsti yang dikutip dalam (Zulkifli,2012). Kerja sama internasional merupakan sebuah pandangan mengenai bagaimana dua atau lebih kepentingan, nilai, dan tujuan dapat menghasilkan sesuatu dalam bentuk pertemuan yang dipromosikan serta dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan. Harapan atau pandangan yang ingin dicapai oleh aktor atau negara yang melakukan kerja sama ini selanjutnya akan diputuskan dalam sebuah kebijakan atau kesepakatan bersama dan dibantu oleh aktor lain sesuai dengan tujuan, nilai, dan persetujuan yang telah disepakati.

Kerja sama internasional merupakan sebuah kewajiban sebagai akibat dari terdapatnya hubungan interdependensi yang terjadi karena adanya *national understanding*, serta memiliki tujuan dan keinginan yang sama yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerja sama internasional ini didasari oleh kepentingan bersama antara aktor atau negara. Kerja sama internasional juga terjadi ketika terdapat dua kepentingan yang bertemu dan tidak terjadi pertentangan atau konflik didalamnya. Ketidakcocokan atau konflik memang tidak dapat dihindari, namun dapat ditekan apabila kedua belah pihak dapat berkomitmen untuk bekerja sama dalam kepentingan dan upaya penyelesaian konfliknya.

Ruang lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerja sama internasional antar negara mencakup berbagai Kerja sama multilateral, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, politik, budaya bahkan pariwisata. Kerja sama tersebut kemudian diwujudkan kedalam sebuah wadah yang disebut sebagai organisasi internasional. Organisasi internasional

adalah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerja sama dalam berbagai bidang dan aspek yang telah disebutkan diatas. Maka dari itu, kerja sama Internasional tidak hanya dilakukan antar negara secara individual, namun juga dilakukan antar negara yang saling bernaung dalam sebuah organisasi maupun lembaga internasional (Zulkifli, 2012).

Kerja sama yang dilakukan UNWTO dan Indonesia memperlihatkan bahwa kedua aktor ini memiliki tujuan bersama yakni untuk mengembangkan komunitas inklusif di sektor pariwisata. Seperti yang telah disebutkan oleh Holsti, setelah sepakat untuk melakukan kerja sama, pihak terkait akan memutuskan sebuah kebijakan oleh aktor lain sesuai dengan tujuan, nilai, dan persetujuan yang telah disepakati. Hal ini terlihat dengan bentuk kerja sama yang dijalankan adalah melalui *AIUla Framework* dimana kerangka kerja ini berisi pedoman dan panduan yang harus dilakukan oleh Negara terkait serta para pemegang pemangku kepentingan dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan.

Dalam KTT G20 di Arab Saudi, para pemimpin menyatakan berkomitmen kuat untuk mengkoordinasikan aksi global, solidaritas dan kerja sama multilateral. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama memulihkan pandemi COVID-19, memulihkan pertumbuhan perekonomian pariwisata dan membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Komitmen mereka sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas dimana mereka memiliki tujuan yang sama untuk mencapai sebuah kepentingan bersama.

B. Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan merujuk kepada aktivitas pariwisata yang dikembangkan berdasarkan prinsip berkelanjutan (*sustainable*). Prinsip ini memiliki makna bahwa setiap pembangunan yang dijalankan untuk kebutuhan saat ini, tidak akan mengurangi kemampuan generasi dimasa yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah konsep turunan dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena nilai tersebut, pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat dilihat dari tiga elemen, yakni keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi (Sutiarso, 2018).

Begitupun dengan pariwisata berkelanjutan, tidak hanya mempertimbangkan keberlanjutan ekonominya saja melainkan juga melihat keberlanjutan lingkungan dan sosialnya. Sebuah pariwisata dapat dikatakan berkelanjutan apabila mampu menjamin keberlanjutan lingkungan ditempat ia dikembangkan, keberlanjutan budaya masyarakat tempat wisata itu berada dan keberlanjutan ekonomi akibat aktivitas yang dijalankan dalam wisata tersebut. Pariwisata berkelanjutan juga didefinisikan sebagai pariwisata yang menjamin keuntungan optimal secara berkelanjutan. Maksud dari hal tersebut adalah keuntungan yang diperoleh dari aktivitas pariwisata itu tidak hanya berdampak pada hari ini saja melainkan hingga masa depan.

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mampu membawa wisatawan kembali ke destinasi wisata dengan pengalaman terbaiknya. Begitu juga dengan destinasi wisata yang mampu memperoleh keuntungan ekonomi

akibat kedatangan wisatawan yang terus menerus. Pariwisata berkelanjutan ini dapat diwujudkan melalui rangkaian kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi (Setijawan, 2018). Dalam menciptakan suatu pariwisata yang berkelanjutan, negara atau pengelola pariwisata tersebut mempertimbangkan kelangsungan sumber daya lingkungan beserta kenyamanan komunitas di daerah destinasi wisata juga. Selama ini, pengelola pariwisata hanya berfokus pada pengembangan wisata akibat permintaan wisatawan yang tinggi. Sedangkan, mereka jarang memperhatikan masa depan lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat di daerah wisata (Liu, 2010).

Dalam menilai sebuah pariwisata sudah menjadi pariwisata berkelanjutan atau tidak, Burns dan Holden (1997) dalam Sutiarso (2018) menyatakan terdapat beberapa prinsip yang bisa dijadikan tolak ukur. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan (Sutiarso, 2018) :

1. Lingkungan dan ekosistem dijadikan modal besar dari suatu pariwisata sehingga penggunaannya benar-benar dipikirkan untuk jangka panjang.
2. Pariwisata dijadikan bentuk kegiatan yang memberi dampak positif, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi negara, melainkan juga kepentingan komunitas setempat, kepentingan wisatawan, serta kepentingan lingkungan hidup.
3. Keterkaitan yang dimiliki oleh pariwisata dengan lingkungan harus terus dijaga dan dikembangkan untuk menjamin lingkungan tersebut agar terus berkelanjutan. Pariwisata tidak berusaha dan tidak merusak sumber

daya yang ada di sekitarnya agar generasi yang akan datang tetap bisa memanfaatkan sumber daya yang sama di waktu berbeda.

4. Kegiatan pariwisata dan pembangunan daerah harus menitikberatkan pada ukuran, lingkungan hidup, dan ciri khas daerah tempat destinasi wisata itu berada.
5. Pariwisata harus menjamin hubungan yang selaras dan positif antara tiga pihak, yakni wisatawan yang berkunjung, masyarakat lokal, serta ekosistem di area wisata.
6. Suatu pariwisata harus terus bisa menyebarkan keuntungan meskipun di tengah perubahan dunia yang tidak tentu. Oleh karena itu, pariwisata harus bisa bersikap adaptif agar tetap laku di pasaran.
7. Semua prinsip pariwisata berkelanjutan yang telah disebutkan di atas harus diwujudkan oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengelola industri pariwisata negara, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di isu lingkungan hidup. Semua pemangku kepentingan ini harus bekerja sama secara harmonis dan saling membantu satu sama lain.

Disamping prinsip-prinsip pariwisata di atas, Tao (2005) dalam Yazdi (2012) juga menjabarkan tiga indikator dari pariwisata berkelanjutan, yaitu :

1. Indikator Kualitas

Suatu pariwisata yang berkelanjutan mampu memberikan pengalaman berkualitas bagi wisatawan, mendorong peningkatan

kualitas hidup bagi masyarakat lokal, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di area wisata.

2. Indikator Keberlanjutan

Suatu pariwisata yang berkelanjutan menjamin kelangsungan sumber daya alam yang menjadi aset dasar pariwisata itu sendiri. Selain itu, pariwisata berkelanjutan juga menjamin kelangsungan budaya dan pengalaman terbaik bagi masyarakat lokal karena dapat memberikan fasilitas pariwisata yang memuaskan untuk wisatawan yang berkunjung.

3. Indikator Keseimbangan

Suatu pariwisata berkelanjutan tidak hanya menopang kepentingan industri, melainkan juga kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal. Pariwisata berkelanjutan menyeimbangkan ketiga kepentingan tersebut dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan dari wisatawan, masyarakat lokal, serta lingkungan hidup.

Berdasarkan sejumlah definisi dan indikator pariwisata berkelanjutan yang telah diuraikan diatas, maka penulis melihat relasi yang kuat antara teori dengan topik penelitian yang akan dibahas. Dalam paparan latar belakang telah disebutkan bahwa kerjasama UNWTO dengan Indonesia melalui kerangka *AlUla Framework* tersebut bertujuan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, wisata inklusi yang nantinya berhasil dicapai oleh kerja sama pariwisata antara UNWTO dan Indonesia itu disusun berdasarkan prinsip atau indikator dari pariwisata berkelanjutan itu sendiri. Hal ini turut dibuktikan dengan berbagai

macam kerja sama, peran, dan aktivitas yang dilakukan UNWTO bersama dengan Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat inklusif di bidang Pariwisata.

Untuk melihat apakah hasil kerja sama UNWTO dan Indonesia melalui program *AIUla Framework* merupakan bentuk dari pariwisata berkelanjutan, maka peneliti akan menggunakan indikator pariwisata berkelanjutan menurut Tao (2005). Pertama, mengkaji apakah *AIUla Framework* mampu memberikan pengalaman berkualitas bagi para wisatawan, mendorong peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat lokal serta meningkatkan kualitas hidup di area wisata. Kedua, mengkaji apakah pengembangan komunitas inklusif melalui program *AIUla Framework* tersebut dapat menjamin kelangsungan sumber daya alam dan menjamin kelangsungan budaya yang ada didalamnya dan memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat karena mereka dapat memberikan fasilitas pariwisata yang memuaskan untuk para wisatawan yang berkunjung. Kemudian yang terakhir, apakah program *AIUla Framework* ini dapat menyeimbangkan kepentingan wisatawan, masyarakat lokal dan lingkungan hidup.

C. Pariwisata Inklusif

Pariwisata inklusif didefinisikan sebagai paradigma yang berkembang untuk menghadirkan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk dapat menikmati aktivitas pariwisata. Dalam menjalankan pariwisata inklusif, tentu sosok yang menjalankannya disebut komunitas inklusif. Komunitas inklusif merupakan komunitas yang memperjuangkan anggota dari berbagai macam

latar belakang dengan menyediakan ruang yang aman bagi anggota komunitas untuk berbagi pengalaman serta mendorong para anggota komunitas untuk belajar antara anggota komunitas lainnya.

Menurut Russell Wilkins, komunitas inklusif menyambut beragam kelompok orang tidak terbatas pada, manula, remaja, anak-anak, penduduk Asli, imigran dan pendatang, penyandang disabilitas, orang yang mengalami tantangan kesehatan mental, dan populasi berpenghasilan rendah. Inklusi sosial dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental anggota masyarakat, termasuk harapan hidup mereka, angka kematian bayi, dan kesehatan mental. Dalam menerapkan inklusivitas dalam suatu komunitas, terdapat beberapa langkah pada implementasinya agar sebuah komunitas dapat dikatakan sebagai komunitas yang inklusif, diantaranya seperti:

1. Melibatkan keterwakilan individu dengan berbagai identitas;
2. Terbuka dengan beragam perspektif;
3. Menghargai pilihan seseorang sebagaimana mereka ingin disebut;
4. Memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berbicara atau menjadi narasumber;

Komunitas inklusif dalam pariwisata memiliki arti bahwa mereka mempunyai hak untuk ikut mengelola, merencanakan, dan mengembangkan pariwisata untuk sepenuhnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menjadikan pariwisata inklusif ini sejalan dengan pariwisata berbasis masyarakat. Negara-negara anggota G20 mendefinisikan bahwa konsep masyarakat inklusif sesuai dengan konsep pembangunan sosial, keterlibatan

masyarakat dan kesejahteraan, partisipasi pemangku kepentingan, dan distribusi peluang untuk pertumbuhan yang sama diantara seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan itu, pariwisata berbasis masyarakat berpusat pada gagasan yang memungkinkan pengembangan masyarakat, pemberdayaan dan kemandirian melalui tindakan kolektif oleh sekelompok orang yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang sama, untuk secara sukarela berpartisipasi atau mengembangkan kegiatan pariwisata sehingga berkontribusi terhadap penghidupan yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Dengan mengunjungi destinasi dan masyarakat, wisatawan dapat berkontribusi terhadap upaya konservasi dan berbagai tujuan kebijakan ekonomi dan sosial, termasuk penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pendidikan (AIUla Framework,2020).

Pengembangan masyarakat inklusif melalui pariwisata ini memiliki potensi lebih tinggi untuk menciptakan dampak positif serta mendorong perubahan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini tertuang dalam *AIUla Framework* yang memberikan panduan dan pedoman untuk pengembangan pariwisata yang inklusif. Mengembangkan lingkungan, infrastruktur, dan layanan yang dapat diakses oleh masyarakat, memberi manfaat bagi masyarakat setempat dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif untuk semua sekaligus membuka peluang pasar baru. Pariwisata inklusif mengartikan bahwa pariwisata adalah hak siapa saja dan dapat dinikmati oleh siapa saja agar *no one left behind* sesuai dengan tujuan *SDG's*. Inisiatif untuk menjadikan pariwisata lebih inklusif dapat kita lihat sebagai upaya untuk meningkatkan

kualitas antar manusia dan memastikan bahwa pariwisata telah memberikan manfaat kepada mereka yang tidak diperhatikan. Di Indonesia sendiri, sesuai dengan Pembangunan Pariwisata 2015-2019 oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pariwisata inklusif di Indonesia digunakan untuk meningkatkan usaha lokal seperti UMKM dalam industri pariwisata, meningkatkan jumlah tenaga kerja yang agar dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kerja sama internasional kepariwisataan lainnya dan mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak mungkin serta untuk mengurangi adanya diskriminasi gender dalam proses pembangunan sektor pariwisata.

Implementasi kerangka kerja *AIUla Framework* harus dapat diterapkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat terutama untuk daerah tertinggal yang ada di pedesaan atau perkotaan, UMKM, perempuan, etnis minoritas, penyandang cacat disabilitas dan penduduk yang tingkat pendidikan formalnya lebih rendah. (*AIUla Framework, 2020*). Scheyvens dan Biddluph (2017) menjelaskan komponen pariwisata inklusif sebagai berikut:

1. Mengatasi segala permasalahan atau hambatan bagi kelompok, komunitas atau masyarakat yang kurang beruntung atau tidak diperhatikan dalam mengakses pariwisata baik sebagai produsen maupun konsumen.
2. Memberikan fasilitas kepada komunitas atau masyarakat yang terpinggirkan agar dapat mengakses pembangunan pariwisata.

3. Memperbaiki kondisi dalam hubungan kekuasaan yang dominan dalam pembangunan pariwisata.
4. Memperluas jangkauan orang yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan pariwisata.
5. Membuka peluang bagi tempat-tempat baru yang dapat dijadikan destinasi objek wisata.
6. Mendorong adanya pembelajaran hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan saling menghargai antara tuan rumah dan tamu.

Dari komponen yang disebutkan diatas, dapat kita lihat bahwa salah satu fokus dari pariwisata inklusif adalah menemukan cara untuk menampung semua lapisan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi antar manusia. Sehingga, dalam melihat penerapan kerja sama UNWTO- Indonesia dalam pengembangan Komunitas Wisata Inklusif di Indonesia dengan merujuk pada program *AlUla Framework* di Indonesia ini dapat dilandaskan serta merujuk pada prinsip pariwisata inklusif dimana pada pelaksanaannya, dampak yang dihasilkan dari program ini dapat terukur oleh peneliti dengan menggunakan indikator dan komponen yang ada.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu gejala atau fenomena yang terkait dengan perilaku dan tindakan yang akan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala yang bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah secara mendalam dari data-data yang telah dikumpul. Semakin banyak data yang dikumpulkan maka semakin baik pula kualitas dari penelitian yang dijalankan. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana dan mengapa atas suatu fenomena sosial.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan sumber informasi data dan merupakan sumber yang didapatkan melalui membaca, meninjau dan menelaah media lain yang bersumber dari buku, dokumen, maupun literatur. Hal yang harus diperhatikan dari sumber data adalah data ini harus kredibel.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Metode ini merupakan pengumpulan data atau informasi dengan melakukan literatur (kepustakaan) yang berasal

dari buku, dokumen, catatan, atau laporan yang berbentuk cetak maupun daring sebagai pendukung penelitian. Teknik ini dilakukan dengan membaca, mencatat, menganalisis, mengolah dan mengumpulkan datanya dari berbagai sumber yang relevan. Peneliti akan memprioritaskan data yang diterbitkan pada tahun-tahun terbaru. Namun, jika ditemukan data yang berasal dari tahun lebih lama dan data tersebut dianggap relevan, maka peneliti akan tetap menggunakan data tersebut sebagai tambahan untuk menyempurnakan analisis.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini dimulai dengan memahami ide pokok dari penelitian, lalu mencari data-data yang berguna sebagai pendukung penelitian yang kemudian akan dianalisis data dan fakta yang telah didapatkan dan akan diringkas sebagai sebuah kesimpulan dari masalah yang diteliti. Tujuannya agar dapat menjelaskan mengenai masalah yang sedang diteliti. Data-data kualitatif terkait topik penelitian ini telah diperoleh dari pengumpulan data melalui sumber-sumber kepustakaan kemudian dianalisis sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerja Sama Internasional

Hubungan internasional memiliki keterkaitan dengan berbagai interaksi antara masyarakat internasional baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya sendiri. Kajian hubungan internasional meliputi berbagai bidang di antara berbagai negara dan meliputi kajian terhadap berbagai lembaga. Kerja sama merupakan salah satu dari sekian interaksi antar aktor yang ada dalam hubungan internasional. Kerja sama antar negara telah ada sepanjang sejarah manusia, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana pada awalnya, dimana kerja sama sebenarnya hadir bersamaan dengan munculnya konsep konflik sebab para aktor-aktor hubungan internasional menganggap bahwa kedua konsep ini muncul menjadi satu paket untuk mewarnai fenomena hubungan internasional sejak dahulu kala. Kerja sama antar negara telah menjadi fokus utama sejak kelahiran studi Hubungan Internasional sebagai disiplin akademis dan menjadi subjek yang menarik di bidang politik, ilmuwan, diplomasi, bidang ekonomi dan sebagainya. Saat itu, kerja sama antar negara memiliki maksud untuk mencapai tujuan perdamaian dunia (*to build world peace*) serta mencegah terjadinya peperangan (*to prevent war*). Namun kini, orientasi kerja sama antar negara telah melebar ke berbagai bidang dan menjadi sebuah kebutuhan hampir seluruh negara yang ada di dunia dan menjadikannya sebagai salah satu konsep dasar yang esensial bersama konsep lainnya (Bakry, 2017).

Perkembangan teori dan konsep kerja sama internasional terus berlanjut sejalan dengan dinamika Hubungan Internasional dan perubahan tuntutan global. Teori-teori tersebut memberikan kerangka pemahaman dan analisis yang berbeda dalam upaya untuk memahami dan mempromosikan kerja sama antar negara dalam berbagai aspek kehidupan internasional dan menjadi salah satu landasan penelitian dalam studi hubungan internasional. Definisi dari kerja sama internasional bersifat umum baik dari segi aktor maupun isu (Dai & Snidal, 2010). Menurut K.J Holsti dalam (Zulkifli, 2012), kerja sama internasional merupakan sebuah pandangan mengenai bagaimana dua atau lebih kepentingan, nilai, dan tujuan yang dapat menghasilkan sesuatu dalam sebuah bentuk pertemuan yang dipromosikan serta dipenuhi oleh setiap pihak yang bersangkutan. Pandangan atau harapan yang ingin dicapai oleh aktor atau negara yang melakukan kerja sama tersebut kemudian diputuskan dalam sebuah kebijakan atau kesepakatan bersama yang dibantu oleh aktor lain sesuai dengan tujuan, nilai, dan persetujuan sesuai yang disepakati. Holsti juga menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong dari suatu aktor atau negara dalam melakukan kerja sama dengan aktor lainnya dalam ruang lingkup hubungan internasional, seperti :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan minimalnya biaya dan keterbatasan produksi yang dikeluarkan untuk berbagai produk kebutuhan masyarakat ;
2. Efisiensi penggunaan biaya dan ancaman keamanan bersama ;
3. Meminimalisir kerugian setiap tindakan suatu negara yang kemudian akan berdampak kepada aktor lain.

Kerja sama internasional dapat pula terjadi ketika aktor-aktor dalam hubungan internasional berada pada situasi dan kondisi dimana kebijakan yang dimiliki oleh suatu Negara dalam memenuhi kepentingannya dianggap sebagai sebuah bentuk penghalang dalam rangka tercapainya tujuan dari negara lain. Atas dasar situasi dan kondisi seperti ini, maka dari itu kerja sama internasional hadir sebagai sebuah solusi dalam menentukan bentuk kesatuan koordinasi kebijakan. Menurut Robert Keohane dalam (Bakry, 2017), terdapat dua poin yang mencakup konsepsi dari kerja sama internasional, diantaranya yakni :

1. Teori kerja sama internasional memiliki pandangan bahwa perilaku setiap aktor sangat dipengaruhi oleh berbagai tujuan dan kepentingan yang dimilikinya, menurut teori ini pandangan tersebut dianggap rasional.
2. Kerja sama internasional yang terjadi akan menghasilkan keuntungan bagi setiap aktor yang tidak harus sama namun bersifat hubungan timbal-balik.

Kerja sama internasional sendiri dapat didefinisikan sebagai hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerja sama internasional memiliki banyak tujuan serta kepentingan, diantaranya adalah (Wulandari & Widiastuti, 2012) :

1. Mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing Negara ;
2. Mencegah atau menghindari konflik yang akan terjadi ;
3. Memperoleh pengakuan sebagai Negara merdeka ;
4. Mempererat hubungan antar Negara di berbagai bidang ;

5. Membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi ;
6. Mengembangkan potensi dari masing-masing negara/aktor ;
7. Membantu membebaskan kemiskinan, dan ;
8. Memajukan perdagangan dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran negara yang terlibat.

Kerja sama internasional menurut Koesnadi Kertasasmita (Fahrezi, 2022) merupakan sebuah kewajiban sebagai akibat dari terdapatnya hubungan interdependensi dan kompleksitas hubungan antar manusia dalam masyarakat internasional. Kerja sama internasional dapat terjadi karena adanya *national understanding*, serta memiliki tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerja sama internasional ini didasari oleh kepentingan bersama antara aktor atau negara-negara, namun demikian kepentingan tersebut tidak identik. Kerja sama internasional juga terjadi ketika terdapat dua kepentingan yang bertemu dan tidak ada pertentangan atau konflik didalamnya. Ketidakcocokan atau konflik memang tidak dapat dihindari, namun dapat ditekan apabila kedua belah pihak dapat berkerja sama dalam kepentingan dan upaya penyelesaian konfliknya. Terdapat tiga tingkatan kerja sama internasional, yakni (Michael Smith, 1990) :

1. Konsensus, yakni merupakan suatu tingkatan kerja sama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara Negara yang terlibat ;
2. Kolaborasi, yakni merupakan suatu tingkat kerja sama yang lebih tinggi dari konsensus yang ditandai dengan sejumlah besar kesamaan tujuan,

saling kerja sama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerja sama dalam memenuhi kepentingan masing-masing aktor ;

3. Integrasi, yakni merupakan kerja sama yang ditandai oleh adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi, jarang sekali terjadi benturan kepentingan diantara Negara yang terlibat.

Teori kerja sama internasional akan berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebab teori ini akan membahas mengenai upaya kerja sama antar negara dalam berbagai bidang, termasuk pariwisata. Dalam penelitian ini, kerja sama antara UNWTO dan Indonesia merupakan salah satu interaksi antar aktor Negara internasional dimana didalamnya terdapat kepentingan setiap Negara. Terdapatnya hubungan interdependensi dari UNWTO – Indonesia sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya memperlihatkan bahwa mereka saling bergantung dan sepakat untuk melakukan kerja sama tergantung dengan tujuannya masing-masing untuk memenuhi kepentingan nasional mereka.

2.2 Pariwisata Berkelanjutan

Istilah pariwisata berkelanjutan pertama kali masuk dalam bahasa pembangunan pariwisata sekitar dua dekade lalu yang menggambarkan kemunculan dan penerapan dari pembangunan berkelanjutan selanjutnya yang meluas secara umum (Yazdi, 2012). Pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Istilah keberlanjutan (*sustainability*) muncul beberapa dekade yang lalu dan mengental setelah Meadow dan kawan-kawan menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* dimana dalam

kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam, proses alur barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tersebut tidak akan dilakukan secara terus menerus.

Hal ini menyadarkan manusia akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, dan perhatian terhadap aspek keberlanjutan ini mencuat pada tahun 1987 dimana *World Commission on Environment and Development (WCED)* atau dikenal sebagai *Brundland Commission* atau yang dikenal juga dengan laporan komisi brundlant mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (Arida, 2012). Kemudian mereka mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang akan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan bukanlah keadaan yang tetap, melainkan melalui proses perubahan dinamis yang semuanya selaras dan meningkatkan potensi saat ini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi pembangunan manusia (Liu, 2003). Konsep dari *sustainable development* itu sendiri terdiri dari tiga elemen sistem yang menyangkut mengenai keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi.

Federasi Alam dan Taman Nasional mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan, pengelolaan, dan kegiatan pariwisata yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, sosial, serta kesejahteraan sumber daya alam dan budaya dalam jangka waktu yang panjang. Pariwisata yang

berkelanjutan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan pariwisata dan membagi manfaat secara adil di bidang sosial, budaya, dan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja langsung atau tidak langsung. Hal ini menjadi bagian dari perkembangan pariwisata yang saat ini terus bertambah kapasitas akomodasi dan populasi, serta berkembangnya investasi di bidang pariwisata. Tujuannya adalah agar pariwisata tidak membawa dampak negatif bagi lingkungan dan aspek lainnya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengembangan pariwisata untuk memaksimalkan potensi yang ada serta membentuk keberlanjutan pariwisata yang dapat melindungi sumber daya penting bagi pariwisata agar dapat dinikmati pada masa depan dan tidak hanya di masa kini (Ardika, 2018).

Pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Menurut (Tao,2005) dalam (Yazdi, 2012), terdapat tiga indikator dari pariwisata berkelanjutan, yaitu indikator kualitas, indikator keberlanjutan dan indikator keseimbangan. Hal yang dimaksud adalah, suatu pariwisata yang berkelanjutan mampu memberikan pengalaman berkualitas bagi wisatawan, mendorong peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat lokal, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di area wisata. Kemudian, suatu pariwisata yang berkelanjutan menjamin kelangsungan sumber daya alam yang menjadi aset dasar pariwisata itu sendiri. Selain itu, pariwisata berkelanjutan dapat menjamin kelangsungan budaya dan pengalaman terbaik bagi masyarakat lokal karena dapat memberikan fasilitas

pariwisata yang memuaskan untuk wisatawan yang berkunjung. Serta, suatu pariwisata berkelanjutan tidak hanya menopang kepentingan industri, melainkan juga kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal. Pariwisata berkelanjutan ini dapat menyeimbangkan ketiga kepentingan tersebut dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan dari wisatawan, masyarakat lokal serta lingkungan hidup.

Burns dan Holdens (1997) mengadaptasi bidang pariwisata sebagai sebuah model yang dapat mengintegrasikan lingkungan fisik (*place*), lingkungan budaya (*host community*) dan tourism (*visitor*). Menurut Burns dan Holden (1997) terdapat prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam *Sustainable Tourism Development* (pembangunan pariwisata berkelanjutan) (Sutiarso, 2018) :

1. Lingkungan memiliki nilai hakiki yang merupakan aset pariwisata. Pemanfaatannya bukan hanya untuk kepentingan pendek, namun juga kepada kepentingan generasi mendatang.
2. Pariwisata harus diperkenalkan sebagai aktivitas yang positif dengan memberikan keuntungan bersama kepada masyarakat, lingkungan dan wisatawan itu sendiri.
3. Hubungan antara pariwisata dan lingkungan harus dikelola sehingga lingkungan tersebut dapat berkelanjutan untuk jangka panjang. Pariwisata tidak merusak sumber daya dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang atau membawa dampak panjang yang dapat diterima.
4. Aktivitas pariwisata dan pembangunan harus tetap peduli terhadap skala/ukuran, alam, karakter tempat dimana kegiatan pariwisata dilakukan.

Selain itu, keharmonisan juga harus dibangun antara kebutuhan wisatawan, tempat dan masyarakat lokal.

5. Dalam industri pariwisata, pemerintah lokal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pemerhati lingkungan lainnya memiliki tugas untuk terus peduli kepada semua prinsip pariwisata diatas dan bekerja sama untuk merealisasikannya.

Pariwisata berkelanjutan disebut juga sebagai *alternative tourism*, yaitu pariwisata yang mempertimbangkan budaya masyarakat setempat dan kelestarian alamnya sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang. UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi pada masa sekarang dan masa depan, serta menjawab kebutuhan pengunjung, lingkungan, dan komunitas tuan rumah. Pariwisata berkelanjutan tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam dan budaya, melainkan juga melestarikannya sehingga dapat dinikmati oleh banyak pihak, termasuk para pemangku kepentingan dan komunitas. Konsep pariwisata berkelanjutan bersifat menyeluruh dan dapat diterapkan pada segala jenis usaha pariwisata, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dalam skala besar atau kecil, dan melibatkan semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah agenda publik yang penting bagi semua pemangku kepentingan di semua tingkatan (Kemenparekraf, 2012).

Pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjamin bahwa keuntungan yang optimal akan diperoleh

secara berkelanjutan dan dapat diwujudkan dengan menggunakan pendekatan atau kebijakan yang bersifat komprehensif serta terintegrasi. Pariwisata ini harus menganut prinsip disini senang, disana senang yang memiliki makna bahwa wisatawan yang sudah melakukan perjalanan wisata, dapat kembali ke rumah dengan membawa memori yang menyenangkan tentang destinasi pariwisata atau daya tarik wisata karena telah memberikan pengalaman manis untuk mereka dan mengajarkan sesuatu yang berharga bagi wisatawan (Setijawan, 2017). Skala total permintaan pariwisata di dunia diperkirakan akan terus meningkat dimasa yang akan datang, jenis dan kualitas produk yang dicari wisatawan pun akan terus berubah. Wisatawan akan menjadi lebih berpengalaman, kritis, lebih sadar akan kualitas dan mencari pengalaman baru serta *good value for money* (Sutiarso, 2018).

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan pada intinya akan berkaitan dengan usaha untuk menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan akan tetap dinikmati dimasa yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan seperti yang disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) merupakan pembangunan yang dapat didukung secara ekologis dan layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Dari aspek alam, daerah pariwisata yang bersangkutan memiliki potensi alam dengan keunggulan dan keunikannya tersendiri. Keanekaragaman tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk dijadikan produk atau aktivitas wisata. Dari aspek budaya, daerah pariwisata harus memiliki berbagai karya seni unik dan peninggalan sejarah yang didalamnya memiliki nilai seni tinggi yang dapat

dikemas menjadi produk pariwisata. Serta dari aspek sosial, masyarakat yang ada di daerah pariwisata memiliki karakter sosial yang ramah tamah dan mudah menerima siapa saja yang memasuki daerah mereka. Potensi sosial ini akan memudahkan mereka untuk membentuk sebuah interaksi sosial antar manusia yang lebih harmonis dan memiliki ciri khas tradisi unik yang dapat dikemas menjadi produk wisata untuk kedepannya dipromosikan (Sutiarso, 2018).

Prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menggabungkan keseimbangan pembangunan sosial dan budaya serta ekonomi yang seimbang tanpa membahayakan kondisi lingkungan. Menurut (Najdeska & Rakicevik, 2012), menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu :

1. Prinsip pelestarian lingkungan dalam pembangunan perlu memperhatikan keberlangsungan ekologi, biologi dan sumber daya alam yang beragam.
2. Prinsip keberlanjutan sosial dan budaya mencakup penyesuaian pengembangan dengan nilai unik tradisional dan integritas identitas dalam masyarakat, juga pengembangan budaya yang sesuai dengan nilai dari komunitas masyarakat itu sendiri.
3. Prinsip pengembangan ekonomi adalah menggunakan sumber daya dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan.

Menurut (Sulistiyadi, 2019), aspek-aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam pariwisata berkelanjutan perlu diperhatikan untuk menunjang pariwisata yang akan terus berkembang. Terdapat tiga prinsip utama dari

sustainable tourism. Hal ini dapat diharapkan dapat memberikan orientasi pengembangan yang sama, yakni :

1. *Community Based Tourism (CBT)*

Community Based Tourism memiliki tujuan untuk menciptakan industri pariwisata yang lebih berkelanjutan dan berfokus pada masyarakat setempat dalam hal perencanaan serta mempertahankan pembangunan pariwisata. pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat, mengakui bahwa masyarakat lokal memiliki hak dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki dimana perintisan, pengelolaan, dan pemeliharaan objek wisata akan menjadi tanggung jawab masyarakat setempat.

2. *Conservation Oriented*

Kawasan konservasi adalah wilayah daratan dan atau di laut yang diperuntukkan untuk melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati serta sumber daya alam dan sumber daya budaya yang dapat dikelola dengan cara-cara yang efektif. Pariwisata berkelanjutan memiliki komitmen untuk melindungi dan bertanggungjawab kepada integritas lingkungan alam dan budaya dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan yang matang.

3. *Carrying Capacity*

Dalam mengantisipasi dampak negatif dari pengembangan pariwisata, diperlukan pendekatan pengelolaan pariwisata dimana tingkat kunjungan kegiatan dan pengelolaan pariwisata pada satu lokasi

dikelola dengan batas yang dapat diterima. Tidak semua lokasi pariwisata dapat dikembangkan dengan sama, terdapat kapasitas atau batas kewajaran dalam mengembangkan sarana dan prasarana serta dalam menyelenggarakan aktivitas pariwisata. Daya dukung ini merupakan suatu konsep yang mengukur tingkat penggunaan pengunjung terhadap terjaminnya keberlangsungan suatu destinasi pariwisata.

Seluruh prinsip berkelanjutan yang telah disebutkan diatas memerlukan dukungan yang besar dari *stakeholders* terkait serta kepemimpinan politik yang kuat untuk memastikan adanya partisipasi aktif dan terjadi kesepakatan antar *stakeholders* tersebut sebab terwujudnya suatu pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah proses yang panjang dan berkesinambungan sehingga membutuhkan pantauan. Hal tersebut akan terlaksana dengan baik apabila sistem penyelenggaraan pemerintahannya baik pula (*good governance*) dimana dibutuhkan partisipasi aktif dan seimbang antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan partisipasi masyarakat lokal, keikutsertaan para pihak terkait (*stakeholders*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, memenuhi dan mewadahi tujuan masyarakat, daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan, serta promosi (Arida, 2012).

2.3 Pariwisata Inklusif

Sektor pariwisata sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan baik di sektor daerah maupun sektor nasional. Saat ini,

pembangunan di sektor pariwisata hanya mengutamakan pembangunan yang berfokus terhadap pertumbuhan ekonomi dimana tidak jarang pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi menimbulkan dampak negatif baik untuk masyarakat maupun lingkungan. Dalam hal ini, pembangunan inklusif merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang berorientasi terhadap pemerataan hak dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam mencapai tujuannya dimana manfaat yang didapat bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakangnya (Kagungan et al, 2022).

Pariwisata inklusif adalah pendekatan dalam industri pariwisata yang bertujuan untuk memastikan partisipasi dan manfaat yang merata bagi semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, kelompok marginal, dan individu dengan kebutuhan khusus. Disabilitas, aksesibilitas, keberlanjutan dan kolaborasi merupakan aspek dari pembangunan inklusif (Gillovic & McIntosh , 2020). Pariwisata inklusif sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya mempertahankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata inklusif menekankan pentingnya keadilan sosial, partisipasi masyarakat lokal, dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan pariwisata. (Arida, 2012).

Pariwisata inklusif merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan akses yang sama untuk melakukan aktivitas pariwisata bagi semua individu tanpa memandang keterbatasan fisik, mental,

maupun sosial mereka. Pariwisata inklusif berusaha untuk menciptakan lingkungan inklusif yang mengakomodasi beragam kebutuhan wisatawan dan mempromosikan manfaat sosial dan ekonomi bagi destinasi, bisnis, dan komunitas lokal dengan meningkatkan daya tarik dan daya saing mereka, meningkatkan infrastruktur dan layanan mereka serta mempromosikan keanekaragaman dan pemahaman budaya (Gillovic & McIntosh, 2020).

Pariwisata inklusif, juga dikenal sebagai pariwisata yang dapat diakses atau pariwisata penyandang cacat yang berupaya memastikan bahwa individu dari segala usia, jenis kelamin, dan status fisik dapat berpartisipasi penuh dalam pengalaman pariwisata. Hal tersebut merupakan serangkaian layanan dan fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang dengan kebutuhan khusus, termasuk penyandang cacat, pelancong lanjut usia, wanita hamil, orang tua dengan kereta bayi, dan mereka yang mengalami cedera sementara. *Accessible Tourism* adalah upaya berkelanjutan untuk membuat tujuan wisata, produk, dan layanan di seluruh dunia dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari keterbatasan fisik atau usia mereka. Konsep ini menekankan pentingnya untuk mengembangkan infrastruktur, fasilitas dan layanan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas atau tantangan mobilitas.

Wisata yang mudah diakses tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam ruang gerak namun termasuk juga dalam hal sosial yang harus tersedia untuk semua warga negara, bukan hanya bagi sekelompok orang tertentu. Pariwisata inklusif mencakup lokasi wisata milik publik dan swasta, mempromosikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan

menciptakan lingkungan yang ramah dan dapat diakses yang mengakomodasi beragam kebutuhan seluruh wisatawan. Pariwisata inklusif berupaya untuk mengurangi hambatan untuk menjalankan aktivitas wisata (Scheyvens & Biddulph, 2017) dan berfokus pada penciptaan peluang untuk inklusi sosial dan menghilangkan hambatan yang menghalangi kelompok-kelompok tertentu untuk berpartisipasi dalam pariwisata.

Pariwisata inklusif juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal, menciptakan peluang kerja, dan mendukung bisnis lokal. Dengan mendorong praktik perjalanan yang bertanggung jawab dan mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap sumber daya alam dan budaya, pariwisata inklusif juga mempromosikan kelestarian lingkungan. Salah satu prinsip utama pariwisata inklusif adalah aksesibilitas. Hal ini mengacu pada memastikan bahwa fasilitas, layanan, dan produk yang dirancang dan dioperasikan dengan cara yang beragam dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan pelancong termasuk penyandang disabilitas. Hal tersebut melibatkan modifikasi struktur fisik untuk menyediakan akses bebas hambatan, memasang teknologi pendukung, atau menyediakan opsi transportasi dan informasi yang dapat diakses dengan mudah.

Pariwisata inklusif berkontribusi pula kepada pembangunan berkelanjutan, dimana dengan mempromosikan dan melestarikan manfaat sosial, ekonomi dan ekologi bagi masyarakat lokal, pariwisata dapat membantu mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung bisnis lokal maupun UMKM. Upaya tersebut juga dapat mempromosikan kelestarian lingkungan

dengan mendorong praktik perjalanan yang bertanggung jawab dan mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap sumber daya alam dan budaya (Nyanjom, Boxall, & Slaven, 2018). Pariwisata inklusif bukan hanya mengenai masalah hak asasi manusia, namun didalamnya terdapat peluang bisnis yang luas bagi tujuan wisata dan pembuatan kebijakan yang nantinya akan berbalik untuk kebutuhan manusia itu sendiri atau untuk mengentaskan kemiskinan.

Konsep pariwisata inklusif menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dan proses pengambilan keputusan serta memberdayakan masyarakat dengan memberikan mereka wadah untuk menuangkan keterampilan, mengembangkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal ini melibatkan program peningkatan kapasitas, pelatihan, pendidikan dan promosi kewirausahaan. Selain itu, pariwisata inklusif merupakan sarana untuk mencapai tujuan *SDG's* nomor 11, yang bertujuan untuk membangun kota dan pemukiman yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pariwisata inklusif menandakan terwujudnya pariwisata yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang menawarkan potensi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Dalam mewujudkan pariwisata inklusif menghadirkan peluang bagi ekonomi kreatif dan kebangkitan pariwisata serta menawarkan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dengan pendekatan yang tepat.

(Scheyvens & Biddulph, 2017) menjelaskan komponen pariwisata inklusif sebagai berikut:

1. Mengatasi segala permasalahan atau hambatan bagi kelompok, komunitas atau masyarakat yang kurang beruntung atau tidak diperhatikan dalam mengakses pariwisata baik sebagai produsen maupun konsumen.
2. Memberikan fasilitas kepada komunitas atau masyarakat yang terpinggirkan agar dapat mengakses pembangunan pariwisata.
3. Memperbaiki kondisi dalam hubungan kekuasaan yang dominan dalam pembangunan pariwisata.
4. Memperluas jangkauan orang yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan pariwisata.
5. Membuka peluang bagi tempat-tempat baru yang dapat dijadikan destinasi objek wisata.
6. Mendorong adanya pembelajaran hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan saling menghargai antara tuan rumah dan tamu.

Pariwisata inklusif dapat mengambil banyak bentuk, termasuk pariwisata yang dapat diakses, pariwisata yang bertanggung jawab, dan pariwisata budaya. Wisata yang dapat diakses berfokus untuk memastikan bahwa fasilitas dan layanan dapat diakses oleh semua pelancong, sementara pariwisata yang bertanggung jawab berupaya mempromosikan praktik perjalanan yang berkelanjutan dan etis (Febrien, 2022). Hadirnya kolaborasi dan kemitraan antara para pemangku kepentingan akan mendorong upaya bersama untuk

mengembangkan strategi pengembangan pariwisata inklusif. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata masyarakat yang inklusif, destinasi dan pemangku kepentingan pariwisata dapat mengembangkan model pariwisata yang lebih adil dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pengunjung, dengan tetap melestarikan budaya lokal dan melindungi lingkungan serta sejalan dengan prinsip yang ada dalam pariwisata berkelanjutan.

Teori pariwisata berkelanjutan sangat relevan dalam konteks penelitian mengenai program *AIUla Framework for Inclusive Community Development through Tourism* di Indonesia. Hal ini dikarenakan program tersebut bertujuan untuk mempromosikan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan inklusif di Indonesia, dimana keberlanjutan dan inklusivitas menjadi dua elemen utama dalam teori pariwisata berkelanjutan. Dalam teori pariwisata berkelanjutan, keberlanjutan ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya dalam pengembangan pariwisata, sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitar. Sedangkan inklusivitas mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu, dapat terlibat dalam pengembangan pariwisata dan mendapatkan manfaat yang sama. Program ini memiliki kesamaan tujuan dengan teori pariwisata berkelanjutan dalam hal mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata melalui kerja sama antara UNWTO dan Indonesia. Dalam konteks Hubungan Internasional, program ini juga relevan karena

melibatkan kerja sama antara UNWTO sebagai organisasi internasional dan pemerintah Indonesia sebagai negara tuan rumah. Kerja sama ini juga memperlihatkan komitmen kedua belah pihak untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan inklusif di Indonesia, yang pada akhirnya dapat membawa manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitar serta meningkatkan hubungan kerja sama antar negara. Oleh karena itu, penelitian mengenai program *AlUla Framework for Inclusive Community Development through Tourism* di Indonesia memiliki relevansi yang penting dalam memahami bagaimana teori pariwisata berkelanjutan dapat diaplikasikan dalam konteks kerja sama internasional dalam pengembangan pariwisata.

2.4 Penelitian Terdahulu

Literatur-literatur mengenai pengembangan pariwisata telah banyak dianalisis dan dibahas dengan menggunakan berbagai macam konsep dan implementasi yang dilakukan. Beberapa penelitiannya adalah artikel jurnal yang disusun oleh Elena Kropinova yang berjudul “Transnational and Cross-Border Cooperation for Sustainable Tourism Development in the Baltic Sea Region”. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana teritori region Laut Baltik menjalankan program kerjasama selama tahun 2014-2020 yang telah berkontribusi pada perkembangan pariwisata berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa dari ribuan proyek kerjasama pariwisata di kawasan tersebut, kerjasama Polandia-Rusia dan Latvia-Russia lah yang paling memberi kontribusi pada pariwisata berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan konsep Sustainable Development Goals 17, proyek kerjasama tersebut telah memberi dampak kepada

ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal, dan perlindungan lingkungan (Kropinova, 2021).

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan Babu George yang berjudul *Inclusive Sustainable Development in the Caribbean Region: Social Capital and the Creation of Competitive Advantage in Tourism Networks*. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literature konsep pariwisata inklusif berkelanjutan dengan tujuan untuk menetapkan indikator dari pariwisata inklusif berkelanjutan dengan mengambil studi kasus pariwisata di region Caribbean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pariwisata Caribbean ‘the Sun-Sea-Sand-Sex’ itu tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat. Pariwisata di Caribbean harus menerapkan konsep pariwisata inklusif berkelanjutan yang menyasar kepada sejumlah manfaat, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, membangun kapasitas warga lokal, menjembatani masyarakat miskin dan kaya, dan membuat pendapatan yang bisa meningkatkan budaya. Mereka mengikuti model inklusif untuk pariwisata berkelanjutan dengan beberapa rekomendasi utama dari *Agenda 2010 for Small Businesses in the ‘World’s Largest Industry’* yang dirilis saat UK Presidency Conference 2020 (George , 2020).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Randika, yang juga membahas mengenai strategi untuk mengembangkan pariwisata yang berkualitas pasca COVID-19 berjudul *Quality Tourism Sebagai Strategi Peningkatan Pariwisata Internasional Di Indonesia Pasca Pandemi COVID-19*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dan tantangan dari quality tourism dalam

meningkatkan pariwisata internasional di Indonesia. Dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan konsep pariwisata internasional, dan pariwisata berkualitas, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa UNWTO menetapkan panduan dan tiga hal yang perlu ada dalam quality tourism, yaitu professional tools, management model, dan powerfull marketing tool. Adapun tantangan yang dihadapi adalah dampak jangka panjang pasca pandemi COVID-19 yaitu pemutusan kerja, penutupan tempat kerja, serta kualitas SDM dan pelayanan yang rendah (Randika, 2023).

Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Risa Stevi Anggraini, membahas mengenai Kerjasama Indonesia - United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam upaya mengembangkan Pariwisata Hijau melalui Sustainable Tourism Through Energy Efficiency With Adaptation And Mitigation Measures (STREAM) di Pangandaran. Sama seperti topik yang dibahas penulis, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan konsep kerja sama internasional, organisasi internasional, isu lingkungan hidup, dan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan dampak dari kerja sama antara Indonesia – UNWTO dalam pengembangan *green tourism* melalui program STREAM di Pangandaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan mencakup kegiatan inti melibatkan tindakan mitigasi dan adaptasi. Dalam hal mitigasi, ada dua kegiatan yang dilakukan, yaitu mengurangi emisi karbon di industri hotel dan mengembangkan energi terbarukan untuk fasilitas pariwisata. Sementara dalam hal adaptasi, ada tiga kegiatan utama, yakni menanam mangrove dan memulihkan terumbu karang,

meningkatkan kesadaran publik, dan meningkatkan kapasitas perencanaan respons terhadap perubahan iklim. Dampak yang dihasilkan setelah bekerja sama selama 3 tahun terhitung dari 2011-2013, dinilai berhasil. Indikator keberhasilan tersebut dilihat dari sarana dan prasarana yang lebih layak dan memadai, meningkatnya pendapatan di sektor pariwisata, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program tersebut (Anggaraini,2016).